

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu modal dasar pembangunan suatu negara adalah sumber daya manusia negara tersebut. Menurut BPS Papua Barat (2017), modal sumber daya manusia merupakan salah satu faktor penting dalam tercapainya pertumbuhan ekonomi. Hal ini dapat diamati dengan dilihatnya tingkat pendidikan, kesehatan, ataupun indikator-indikator lainnya yang telah tercantum dalam laporan pembangunan manusia yang dipublikasikan oleh *United Nation Development Programme* (UNDP)¹.

United Nation Development Programme (UNDP), mendefinisikan pembangunan manusia sebagai proses perluasan pilihan bagi manusia yang dilihat sebagai proses pembangunan kemampuan manusia dalam tingkat pendidikan, kesehatan, dan produktivitas. Demokrasi dan hak asasi manusia dewasa ini menjadi sebuah pembahasan baru yang berpengaruh dalam keberhasilan tercapainya pembangunan manusia (Badan Pusat Statistik, 2017). Sehingga makin disadari bahwa fokus pembangunan harus bertumpu pada manusia itu sendiri.

Nurfitriani (2017), menyatakan bahwa keberhasilan suatu pembangunan manusia dapat diukur dengan menggunakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau dikenal juga dengan *Human Development Index (HDI)*. Pengukuran ini pertama kali dikenalkan oleh

¹ *Badan Pusat Statistik Papua Barat : Indeks Pembangunan Manusia Papua Barat 2017*

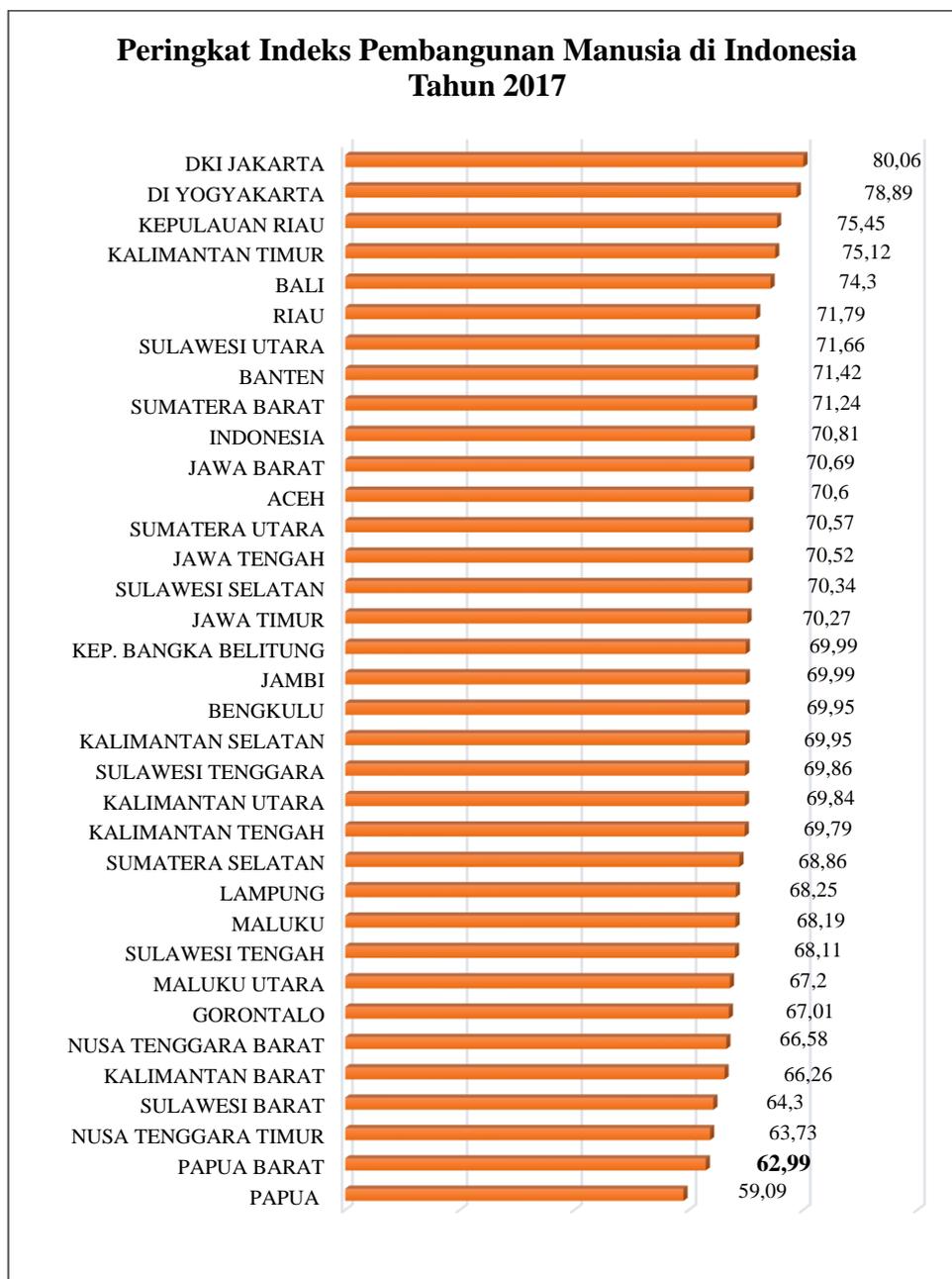
Amartya Sen, seorang ekonom Pakistan dibantu oleh Lord Desai (*London School of Economics*) dan Gustav Ranis (*Yale University*).

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau *Human Development Index* (HDI) adalah indikator pembangunan yang diprakarsai oleh UNDP (*United Nation Development Programme*). Kehidupan yang lebih baik harus diukur bukan hanya dalam skala ekonomi melainkan juga harus mempertimbangkan variabel-variabel lain seperti panjangnya umur manusia (*longevity*) sebagai gambaran dari kecukupan nutrisi dalam masyarakat, pendidikan, dan standar hidup layak yang dicerminkan dalam GDP per kapita (Hudiyanto, 2015).

Pembangunan manusia sebagai ukuran kinerja pembangunan secara keseluruhan melalui tiga pendekatan dimensi dasar : 1) Dimensi Kesehatan yang dilihat dari angka harapan hidup waktu lahir; 2) Dimensi Pendidikan yang dilihat dari angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah; 3) Dimensi Ekonomi yang dilihat dari pengeluaran per kapita yang disesuaikan, diukur dengan nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli.

Kualitas sumber daya manusia sangat penting untuk perluasan dan peningkatan ekonomi suatu daerah. Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) atau *United Nation* mengembangkan konsep pembangunan manusia dan menetapkan peringkat capaian pembangunan manusia sebagai berikut :

1. Rendah : IPM kurang dari 60 poin
2. Sedang : IPM diantara 60 dan 70 poin
3. Tinggi : IPM diantara 70 dan 80 poin
4. Sangat Tinggi : IPM lebih tinggi dari 80 poin



Sumber : *Badan Pusat Statistik Papua Barat, 2017 (data diolah)*

Gambar 1.1.
Peringkat IPM di Indonesia Tahun 2017

IPM Provinsi di Indonesia yang ditunjukkan oleh **Gambar 1.1** memperlihatkan bahwa IPM tertinggi dimiliki oleh Provinsi DKI Jakarta

yaitu sebesar 80,06 poin berada diatas rata-rata IPM Nasional yaitu 70,81 poin. Namun, Provinsi Papua Barat memiliki angka IPM sebesar 62,99 termasuk pada kategori menengah dalam perolehan nilai IPM, dan berada hanya satu tingkat di atas Provinsi Papua yakni hanya sebesar 59,09.

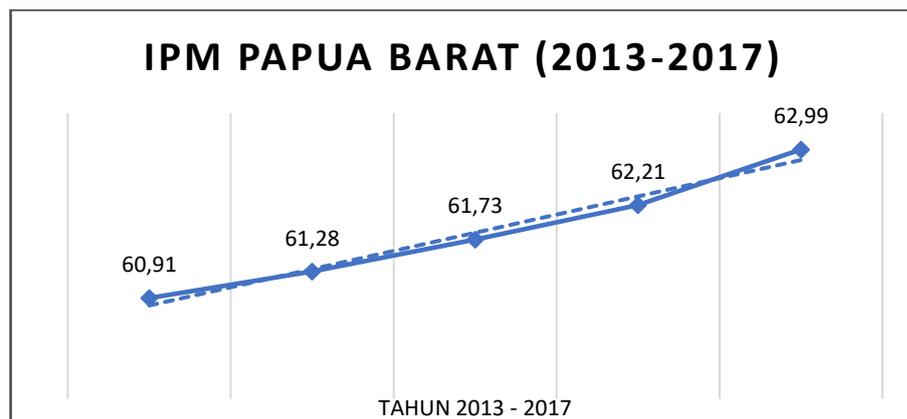
Semakin tinggi Indeks Pembangunan Manusia, maka semakin tinggi pula mutu sumber daya manusia yang dimiliki oleh daerah tersebut. **Gambar 1.1** juga menunjukkan bahwa IPM Provinsi Papua Barat berada pada peringkat 34 nasional, hal ini mengindikasikan bahwa IPM Papua Barat masih sangat rendah bahkan dibandingkan dengan provinsi lainnya yang termasuk dalam kawasan Sulampua (Sulawesi, Maluku, Papua) di Indonesia.



Sumber : *Badan Pusat Statistik Papua Barat, 2017 (data diolah)*

Gambar 1.2.
Perbandingan IPM di Kawasan Sulampua dan Indonesia 2017

Dapat dilihat pada **Gambar 1.2** tersebut, IPM Provinsi Papua Barat menempati peringkat 9 diantara provinsi-provinsi lainnya dalam kawasan Sulampua dengan perolehan nilai IPM sebesar 62,99. Perolehan ini termasuk ke dalam kategori sebagai IPM sedang, dapat dikatakan hampir rendah. Tetapi demikian, perolehan ini masih berada pada satu peringkat di atas Provinsi Papua, dengan nilai IPM sebesar 59,09 yang dikategorikan sebagai IPM rendah. Dengan demikian pada tahun 2017, mutu sumber daya manusia yang ada di Provinsi Papua Barat dikatakan pada kategori sedang terlihat dari angka IPM-nya.

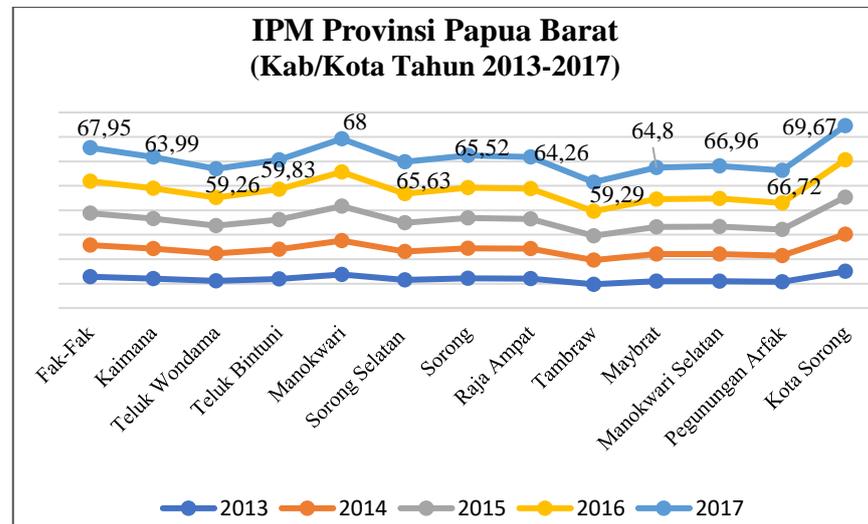


Sumber : *Badan Pusat Statistik Papua Barat, 2013-2017 (data diolah)*

Gambar 1.3.
IPM Provinsi Papua Barat 2013 – 2017

Gambar 1.3 menunjukkan perkembangan IPM Provinsi Papua Barat dari tahun 2013 hingga 2017 mengalami kenaikan tiap tahunnya selama periode terkait. Peningkatan yang terjadi selama periode tahun 2013 sampai 2017 adalah sebanyak 2,08 poin. Hal ini mengindikasikan bahwa dengan naiknya angka IPM Papua Barat dapat diartikan juga bahwa mutu sumber

daya manusia-nya juga mengalami kenaikan. Namun demikian, perolehan IPM Provinsi Papua Barat masih dalam kategori sedang.



Sumber : *Data BPS Papua Barat, 2013-2017 (data diolah)*

Gambar 1.4

IPM Provinsi Papua Barat, Kab/Kota 2013-2017

Dari gambar 1.4. diatas, terlihat bahwa Indeks Pembangunan Manusia per-Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat dari tahun 2013-2017 mengalami perkembangan yang fluktuatif. Kota Sorong sebagai IPM tertinggi di Provinsi Papua Barat yaitu nilai IPM sebesar 69,67, sedangkan angka IPM terendah di Provinsi Papua Barat adalah pada Kabupaten Teluk Wondama yakni sebesar 59,26.

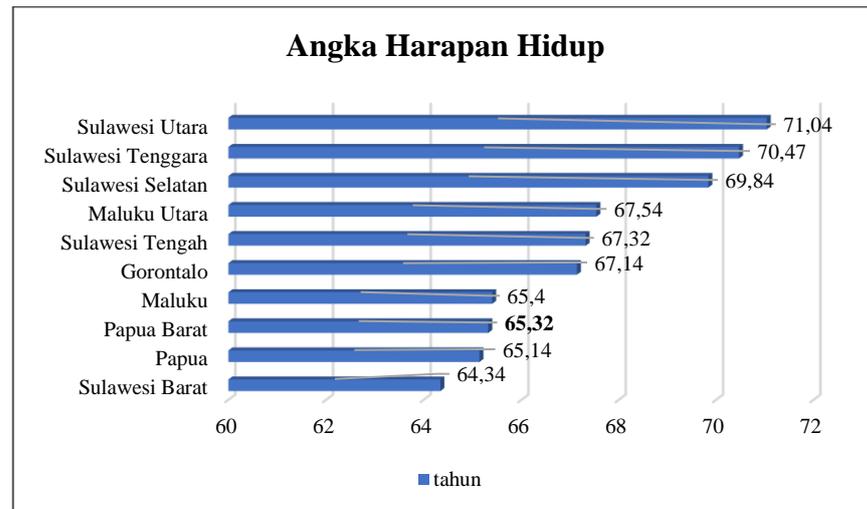
Melihat angka IPM Provinsi Papua Barat, maka peran yang dipegang oleh pemerintah menjadi sangat penting. Pemerintah dituntut agar mampu melakukan fungsi alokasi atas pelayanan publik seperti kesehatan,

pendidikan, serta infrastruktur lainnya agar tercapai kesejahteraan sosial masyarakat yang menyangkut pembangunan manusia.

Menurut Badan Pusat Statistik (2017), upaya peningkatan kesehatan penduduk penting dilakukan, guna mengurangi morbiditas atau mengurangi angka kesakitan penduduk. Indikator yang digunakan untuk menggambarkan status kesehatan dalam pencapaian IPM adalah Angka Harapan Hidup (AHH). Pencapaian angka harapan hidup yang tinggi, mengindikasikan bahwa penduduk memiliki status kesehatan yang baik.

Angka Harapan Hidup merupakan rata-rata tahun hidup yang masih akan dijalani oleh seseorang yang berhasil mencapai umur tertentu, pada suatu tahun tertentu dan dalam situasi mortalitas yang berlaku dilingkungan masyarakatnya. Hal ini berguna sebagai indikator keberhasilan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada umumnya dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat pada khususnya². Berikut adalah perbandingan AHH di dalam Kawasan Sulampua (Sulawesi, Maluku, dan Papua) dan rata-rata nasional tahun 2017.

² *Sistem Informasi Rujukan Statistik (Badan Pusat Statistik) : Angka Harapan Hidup*



Sumber : *Data Badan Pusat Statistik, 2017 (data diolah)*

Gambar 1.5
Angka Harapan Hidup di Kawasan Sulampua 2017

Dari gambar 1.5 diatas menunjukkan Angka Harapan Hidup yang terhitung untuk Provinsi-provinsi dalam Kawasan Sulampua tahun 2017. Dapat dilihat Provinsi Papua Barat menempati posisi dalam tiga terbawah dalam sensus penduduk untuk Angka Harapan Hidup di Kawasan Sulampua. Angka Harapan Hidup yang terhitung untuk Papua Barat dari Sensus Penduduk tahun 2017 adalah 65,32 tahun. Artinya bayi-bayi yang dilahirkan tahun 2017 akan dapat hidup sampai usia 65 tahun. Angka ini lebih tinggi dibanding dengan AHH (Angka Harapan Hidup) dua provinsi terbawah lainnya yaitu Provinsi Papua dan Provinsi Sulawesi Barat, yang masing-masing memiliki Angka Harapan Hidup sebesar 65,14 tahun dan 64,34 tahun. Kemudian, ketika dibandingkan dengan rata-rata nasional dari tahun 2013 – 2017, maka Angka Harapan Hidup yang dimiliki oleh Papua Barat terhadap rata-rata nasional adalah sebagai berikut.



Sumber : *Data Badan Pusat Statistik, 2013-2017 (data diolah)*

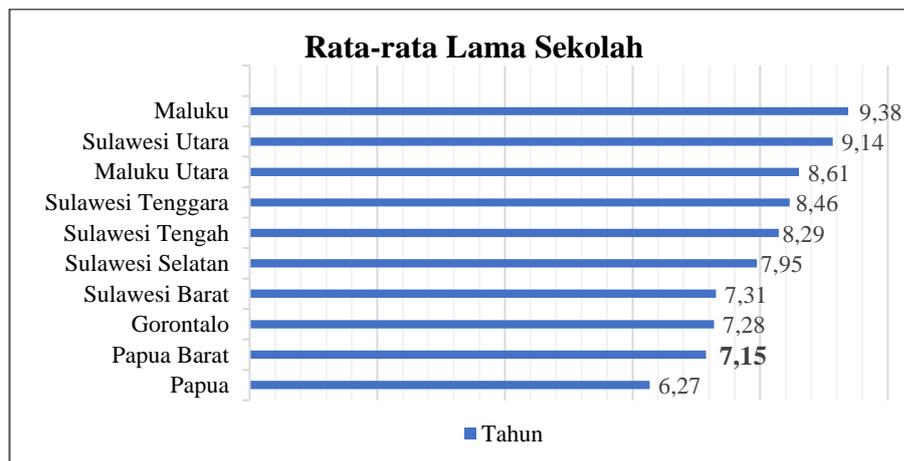
Gambar 1.6

Angka Harapan Hidup Papua Barat dan Rata-rata Nasional

Angka Harapan Hidup (AHH) Provinsi Papua Barat dengan rata-rata nasional pada **Gambar 1.6** di atas menunjukkan bahwa perkembangan angka harapan hidup per tahun oleh Provinsi Papua Barat tercatat tidak lebih dari satu tahun. Pada tahun 2017, Angka Harapan Hidup (AHH) Provinsi Papua Barat hanya mengalami kenaikan sebanyak 0,2 tahun dibanding tahun 2016, hal ini dapat diartikan bahwa kondisi angka kematian bayi (*infant mortality rate*) di Provinsi Papua Barat termasuk dalam kategori *hardrock*. Kategori *hardrock* ialah kondisi sulit terjadinya penurunan angka kematian bayi yang tajam dalam satu tahun, maka hasilnya adalah angka harapan hidup yang dihitung berdasarkan harapan hidup waktu lahir menjadi lambat untuk mengalami peningkatan (Badan Pusat Statistik, 2017).

Upaya untuk mencapai sebuah nilai tambah dalam perekonomian maupun pendapatan membutuhkan peranan dari intelektual manusia, yaitu dalam hal memaksimalkan pengelolaan sumber daya yang dimiliki guna meningkatkan kualitas taraf hidup (Badan Pusat Statistik, 2017).

Pencapaian intelektual tersebut bisa diperoleh dengan baik dalam jenjang formal ataupun informal. Indeks Pendidikan sebagai salah satu indikator pencapaian IPM, dihitung menggunakan rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah. Angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS) merupakan sebuah pendekatan dalam mengukur taraf pendidikan penduduk. Secara tidak langsung kedua indikator diatas dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti jumlah tenaga pengajar (guru), kualitas tenaga pengajar, dan kualitas kurikulum pengajaran.



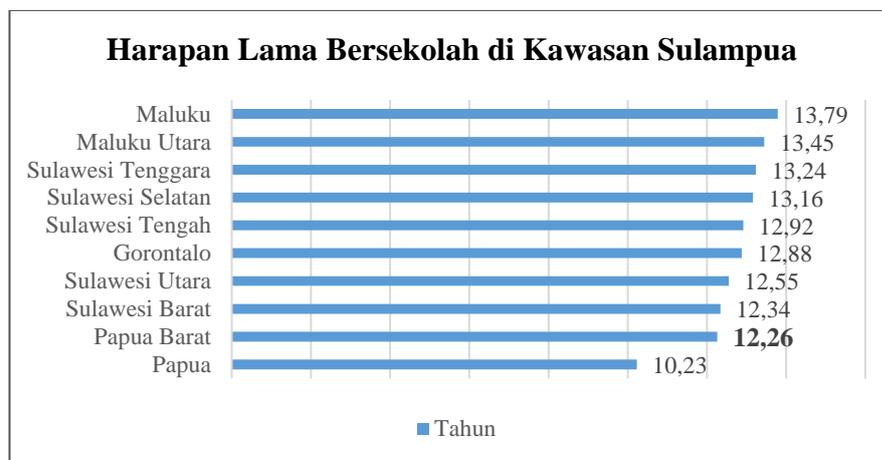
Sumber : *BPS Provinsi Papua Barat 2017(data diolah)*

Gambar 1.7

RLS di Papua Barat dan Kawasan Sulampua Tahun 2017

Gambar 1.7 diatas menunjukkan rata-rata lama sekolah (RLS) di Kawasan Sulampua tahun 2017, dan Papua Barat adalah provinsi terbawah ke-dua dalam sepuluh provinsi lainnya di Kawasan Sulampua dengan angka rata-rata lama sekolah hanya mencapai 7,15 tahun. Hal ini berarti rata-rata penduduk Provinsi Papua Barat mampu menyelesaikan pendidikan sampai pada kelas 1 SMP atau putus sekolah saat kelas 2 SMP. Rendahnya rata-rata

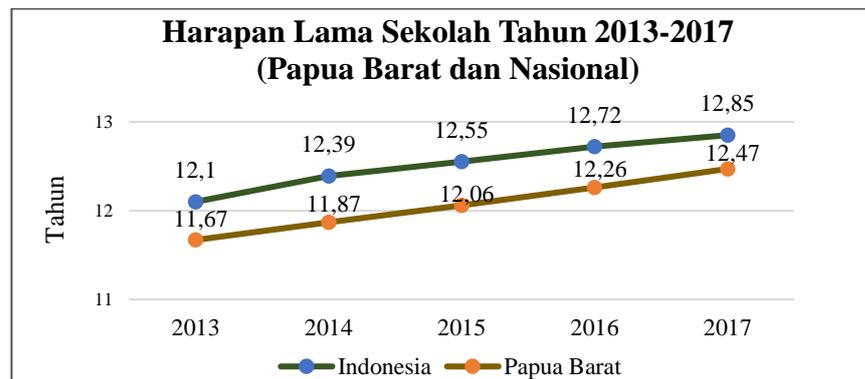
lama sekolah penduduk Provinsi Papua Barat berkaitan dengan rendahnya tingkat keberlanjutan siswa ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Dapat pula dikatakan bahwa rendahnya rata-rata lama sekolah berkaitan dengan masih rendahnya angka partisipasi murni pendidikan menengah atas dan pendidikan tinggi (Badan Pusat Statistik, 2017).



Sumber : *Badan Pusat Statistik 2017 (data diolah)*

Gambar 1.8.
HLS di Kawasan Sulampua Tahun 2017

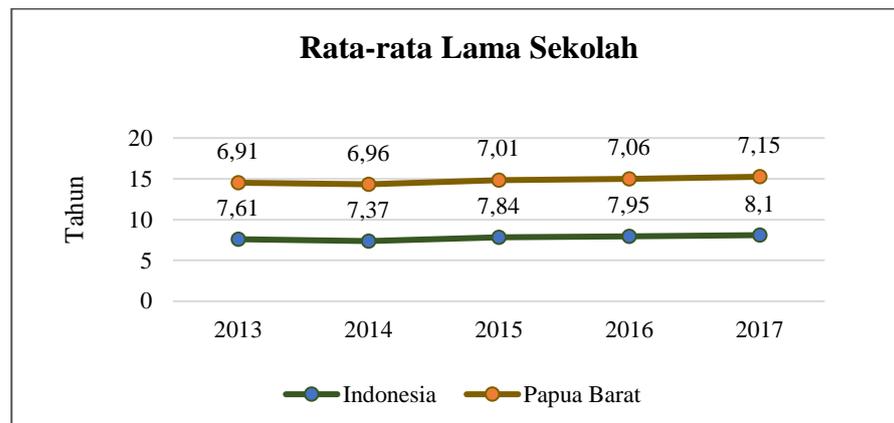
Kemudian, harapan lama sekolah di Provinsi Papua Barat yang ditunjukkan dengan **Gambar 1.8** menggambarkan bahwa pencapaian angka harapan lama sekolah yang diperoleh Provinsi Papua Barat tahun 2017 adalah sebesar 12,47 tahun. Capaian harapan lama sekolah ini, seharusnya tidak jauh berbeda dengan rata-rata lama sekolah. Namun, terjadi gap yang cukup besar diantara kedua-nya yaitu sebesar 5,32 tahun.



Sumber : *Badan Pusat Statistik, 2013-2017 (data diolah)*

Gambar 1.9.
HLS Papua Barat dan Nasional, 2013-2017

Angka Harapan Lama Sekolah yang ada pada **Gambar 1.9.** diatas menunjukkan perubahan yang dialami oleh Provinsi Papua Barat dan rata-rata nasional selama kurun waktu lima tahun, yaitu dari tahun 2013 sampai 2017. Selama periode tersebut perubahan angka harapan lama sekolah di Provinsi Papua Barat adalah sebesar 0,8 tahun, sedangkan untuk perubahan rata-rata nasional selama lima tahun adalah sebesar 0,75 tahun. Kemudian pada tahun 2017, Harapan Lama Sekolah (HLS) yang dimiliki oleh Papua Barat mengalami kenaikan sebanyak 0,21 tahun dibanding dengan kondisi tahun 2016. Namun, perolehan ini masih berada di bawah rata-rata nasional tahun 2017 yaitu sebesar 0,38 tahun.



Sumber : *Badan Pusat Statistik, 2013-2017(data diolah)*

Gambar 1.10
RLS Papua Barat dan Nasional, 2013-2017

Gambar 1.10 menunjukkan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Provinsi Papua Barat terhadap Nasional dari tahun 2013 sampai 2017. RLS yang dimiliki oleh Papua Barat tahun 2017 mengalami peningkatan dibanding tahun 2016 yaitu sebesar 0,09 tahun. Angka ini masih di bawah rata-rata nasional tahun 2017 yaitu sebesar 0,95 tahun. Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) idealnya memiliki perbedaan yang tidak jauh, namun berdasarkan paparan di atas masih terdapat gap yang cukup besar diantara kedua indikator tersebut. Hal ini kemudian menjadi sangat penting bagi pemerintah untuk memberikan perhatian yang lebih besar, guna meningkatkan tingkat keberlanjutan siswa dalam mengenyam pendidikan. Sehingga hal ini akan berpengaruh pada perbaikan pendidikan yang ada di Provinsi Papua Barat.

Fasilitas umum atau infrastruktur yang berkaitan dengan sarana prasarana merupakan sebuah pendukung utama terselenggarakannya

proses-proses yang menyangkut kepentingan umum. Fasilitas umum disuatu daerah menjadi sangat penting dalam menunjang kegiatan masyarakat, dengan hal ini masyarakat menjadi dimudahkan dalam aktivitas sehari-hari, sehingga dapat meningkatkan produktifitasnya. Menurut Hidayat (2018), infrastruktur dalam fasilitas umum terbagi menjadi dua, yaitu: (1) Transportasi, digunakan dalam rangka meningkatkan akses dan mobilitas masyarakat; (2) Energi, digunakan oleh masyarakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yaitu berupa pemerataan tingkat kelayakan hidup masyarakat, kedua hal ini diwujudkan dalam pendistribusian energi berupa pasokan energi listrik dan air bersih. Infrastruktur memiliki pengaruh dalam meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia, hal ini dikarenakan dengan adanya infrastruktur dapat mendorong tingkat kesejahteraan masyarakat (Hidayat, 2018).

Hal inilah yang kemudian menjadi alasan peneliti memilih seluruh kabupaten/kota di Provinsi Papua Barat sebagai objek penelitian. Ini juga dikarenakan Provinsi Papua Barat memiliki angka indeks pembangunan manusia yang meningkat tiap tahunnya dan berada pada kategori sedang dibandingkan dengan provinsi lainnya di Pulau Papua, yaitu Provinsi Papua yang masih berada pada kategori rendah. Namun demikian, pencapaian ini masih membuat Provinsi Papua Barat berada pada posisi kedua terendah dalam pencapaian Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia. Peningkatan indeks pembangunan manusia merupakan sebuah kajian yang menarik untuk dibahas, angka ini mencerminkan pencapaian dari kinerja

pengembangan sumber daya manusia yang handal untuk membangun perekonomian wilayah tersebut. Maka dari itu, penulis tertarik untuk menelaah lebih lanjut melalui penelitian yang berjudul : **“Analisis Determinasi Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Papua Barat Tahun 2013 – 2017”**

B. Batasan Masalah

Berkaitan dengan faktor keterbatasan yang ada dan terdapat banyaknya faktor yang mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia, maka peneliti akan berfokus pada:

1. Variabel Dependen dalam penelitian ini adalah Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat tahun 2013 - 2017.
2. Variabel Independen yaitu PDRB, Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan dan Pengeluaran Pemerintah Sektor Fasilitas Umum, di Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat tahun 2013 – 2017.
3. Variabel ini menggunakan data panel di tiga belas Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat dari tahun 2013 – 2017.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pengaruh PDRB kabupaten/kota terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Papua Barat tahun 2013 – 2017 ?

2. Bagaimana pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan kabupaten/kota terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Papua Barat tahun 2013 – 2017 ?
3. Bagaimana pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Fasilitas Umum kabupaten/kota terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Papua Barat tahun 2013 – 2017 ?

D. Tujuan Penelitian

Ada pun tujuan dari penelitian ilmiah ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh PDRB kabupaten/kota terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Papua Barat tahun 2013 – 2017.
2. Untuk mengetahui pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan Kabupaten/Kota terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Papua Barat tahun 2013 – 2017.
3. Untuk mengetahui pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Fasilitas Umum Kabupaten/Kota terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Papua Barat tahun 2013 – 2017.

E. Manfaat Penelitian

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini, diharapkan dapat bermanfaat bagi beberapa pihak, yaitu diantaranya adalah :

1. Bagi Penulis

Dapat menambah ilmu dan wawasan tentang hal yang diteliti sehingga dapat membandingkan antara teori yang diterima selama perkuliahan dan realita di lapangan.

2. Bagi Mahasiswa

Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan masukan dan pengetahuan bagi pembaca mengenai PDRB, Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan, dan Pengeluaran Pemerintah Sektor Fasilitas Umum terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Papua Barat Tahun 2013 – 2017.

3. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi kepada masyarakat mengenai kondisi indikator Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Papua Barat.

4. Bagi Pemerintah Daerah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran serta sebagai bahan masukan dalam penentuan sebuah kebijakan pemerintah daerah terutama dalam bidang peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam masa mendatang.